



LAPORAN SURVEI
INDEKS PERSEPSI KORUPSI
DI PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
(Semester I)



TAHUN
2020



LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN
INDEKS PERSEPSI KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
SEMESTER I**

Disahkan di Sarolangun

Agustus 2020



Top Manager

PHILLIP MARK SOENTPIET, SH., MH.-
NIP. 19741114 200012 1 002

Quality Management Representative

NUNUNG KRISTIYANI, SH., MH.-
NIP. 19770208 200112 2 004

Ketua Tim Survei,

DEDET SYANGITRA, SH.-
NIP. 19831206 200912 1 004

Assamuaalaikum Wr.Wb.

Dalam rangka Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum serta untuk mendukung Reformasi Birokrasi serta menuju Zona Integritas di Lingkungan Badan Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Sarolangun telah mengadakan Survey Indeks Persepsi Korupsi yang berdasarkan Surat Dirjen Badilum tertanggal 13 April 2016 Nomor 520/DJU/PS.02/4/2016 serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Pengadilan menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya. Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan dan laporan survei ini masih perlu ada masukan kritik dan saran agar ke depan pelaksanaan dari laporan survei dapat lebih baik sehingga berguna bagi berbagai pihak khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Sarolangun dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun.

Sarolangun, Agustus 2020

Tim Survei

	<i>Halaman</i>
LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB. I PEDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja	2
BAB. II METODOLOGI	
2.1. Metode Penelitian.....	4
2.2. Populasi dan Sampel	4
2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis	4
2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control	4
2.5. Teknik Analisis Data	5
2.6. Tahapan Pelaksanaan	5
BAB. III Indeks Persepsi Korupsi	
3.1. Profil Responden	7
3.2. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator	9
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja	15
3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan	16
BAB. IV Penutup	
4.1. Kesimpulan	18
4.2. Rekomendasi	18
LAMPIRAN	

<i>No. Tabel</i>		<i>Halaman</i>
1.	Model Alur Penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas	5
2.	Ruang Lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi	6
3.	Nilai Persepsi	6
4.	Tingkat Pendidikan Responden	7
5.	Jenis Pekerjaan Responden	7
6.	Kelompok Usia Responden	8
7.	Kelompok Jenis Kelamin	9
8.	Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan	9
9.	Indeks Pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan	10
10.	Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh	10
11.	Indeks Pada Indikator Transaksi Biaya	11
12.	Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan	12
13.	Indeks Pada Indikator Hadiah	12
14.	Indeks Pada Indikator Transparansi Biaya	13
15.	Indeks Pada Indikator Pencaloan	14
16.	Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang	14
17.	Indeks Pada Transaksi Rahasia	15
18.	Indeks Persepsi Korupsi Satua Kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun	16
19.	Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun	16
20.	Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Sarolangun	16

<i>No. Gambar</i>		<i>Halaman</i>
1.	Grafik Tingkat Pendidikan Responden	7
2.	Grafik Jenis Pekerjaan Responden	8
3.	Grafik Kelompok Usia Reponden	8
4.	Grafik Kelompok Jenis Kelamin	9
5.	Graik Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan	9
6.	Grafik Indeks Pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan	10
7.	Grafik Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh	11
8.	Grafik Indeks Pada Indikator Transaksi Biaya	11
9.	Grafik Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan	12
10.	Grafik Indeks Pada Indikator Hadian	13
11.	Grafik Indeks Pada Indikator Transparansi Biaya	13
12.	Grafik Indeks Pada Indikator Percaloan	14
13.	Grafik Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang	15
14.	Grafik Indeks Pada Indikator Transaksi Rahasia	16

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2015 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner

kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 bulan (dua kali dalam satu tahun).

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 50 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun). Wakil Ketua Pengadilan Sarolangun akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara

tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan Indeks Persepsi Korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

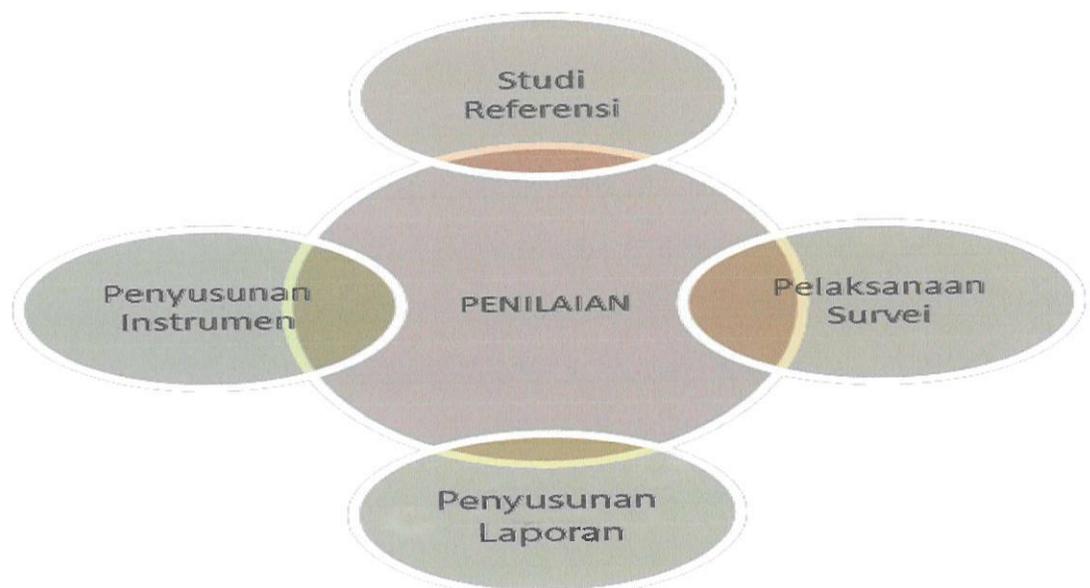
Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1
Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25,00 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III. INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. PROFIL RESPONDEN

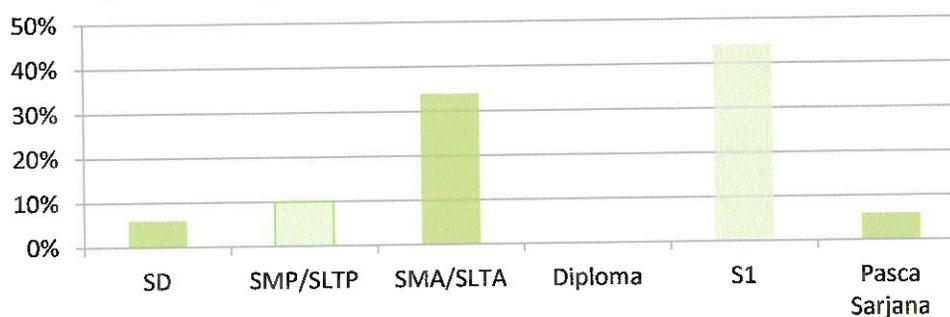
3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden.

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di pada Pengadilan Negeri Sarolangun mayoritas memiliki latar belakang pendidikan Sarjana dengan persentase 44,00 % (empat puluh empat persen)

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Responden

No	Pendidikan	Frekuensi	%
1.	SD	3	6
2.	SMP/ SLTP	5	10
3.	SMA/ SLTA	17	34
4.	Diploma	0	0
5.	Sarjana	22	44
6.	Pasca Sarjana	3	6
Jumlah		50	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



Gambar 1.
Grafik Tingkat Pendidikan Responden

3.1.2. Pekerjaan Responden.

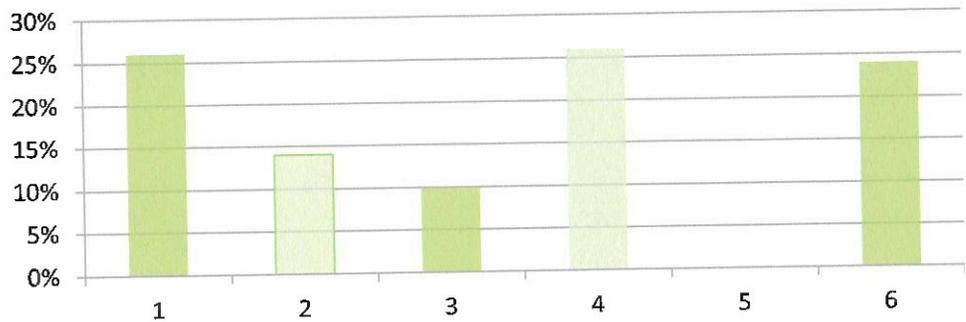
Dari ruang lingkup jenis pekerjaan responden, pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Sarolangun mayoritas memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Wiraswata dengan persentase masing-masing sebesar 26 % (dua puluh enam) persen, sedangkan untuk pekerjaan lainnya terdiri dari Honorer sebanyak 2 (dua) responden, Advokat sebanyak 6 (enam) responden, dan Petani sebanyak 4 (empat) responden dengan jumlah persentase sebesar 24 (dua puluh empat) persen ;

Tabel 5. Jenis Pekerjaan Responden

No	Pekerjaan	Frekuensi	%
1.	PNS	13	26
2.	TNI/ Polri	7	14
3.	Karyawan Swasta	5	10
4.	Wiraswasta	13	26
5.	Pelajar	0	0

6. Lainnya	12	24
Jumlah	50	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



Gambar 2.
Grafik Jenis Pekerjaan Responden

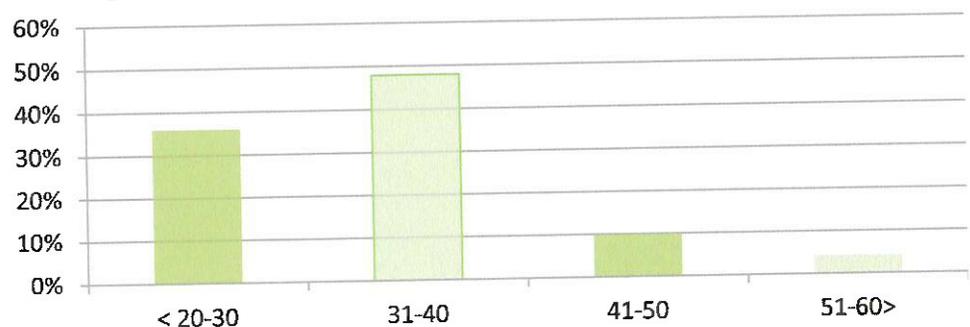
3.1.3. Kelompok Usia Responden.

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar Kelompok Usia Responden pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Sarolangun mayoritas berumur antara 31 sampai dengan 40 tahun dengan persentase sebesar 48% (empat puluh delapan) persen.

Tabel 6. Kelompok Usia Responden

No	Umur	Frekuensi	%
1.	< 20 - 30	18	36
2.	31 - 40	24	48
3.	41 - 50	5	10
4.	51 - 60 >	3	6
Jumlah		50	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



Gambar 3.
Grafik Kelompok Usia Responder

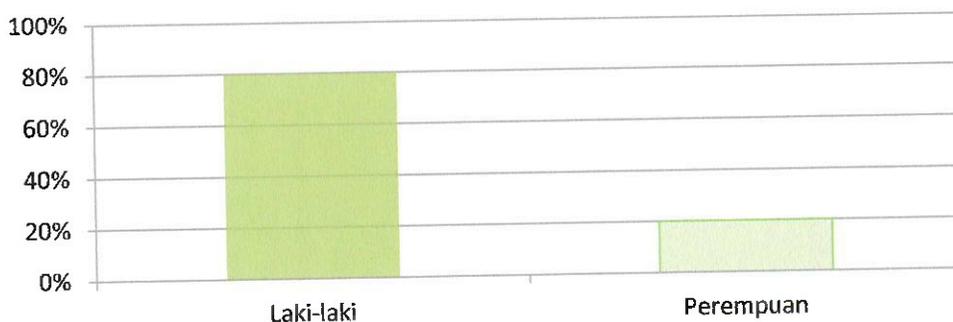
3.1.4. Kelompok Jenis Kelamin.

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Sarolangun berdasarkan kelompok jenis kelamin, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan Pada Pengadilan Negeri Sarolangun adalah laki-laki dengan persentase 62,50 %. (enam puluh dua koma lima puluh persen)

Tabel 7. Kelompok Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1.	Laki-laki	40	80
2.	Perempuan	10	20
Jumlah		50	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



Gambar 4.
Grafik Kelompok Jenis Kelamin

3.2. INDEKS PERSEPSI KORUPSI PER INDIKATOR

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Lingkup Manipulasi Peraturan ini diperoleh rata-rata skor 3,82 berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja “bersih dari korupsi”. Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Manipulasi Peraturan dalam katagori berkinerja “bersih dari korupsi”.

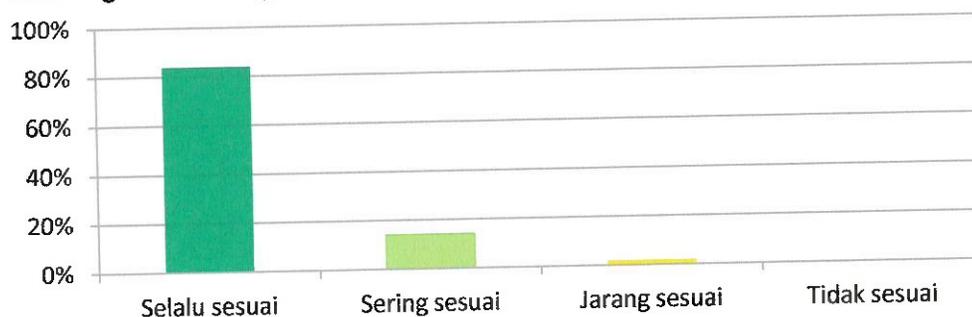
Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Manipulasi Peraturan di sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 8. Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Tidak sesuai	1	0	0	0,00
2.	Jarang sesuai	2	1	2	0,04
3.	Sering sesuai	3	7	14	0,42
4.	Selalu sesuai	4	42	84	3,36
Jumlah			50	100	3,82

*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai perunsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



Gambar 5.
Grafik Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan

3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Lingkup Penyalahgunaan Jabatan ini diperoleh rata-rata skor 3,86 berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja “bersih dari korupsi”. Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Penyalahgunaan Jabatan dalam katagori berkinerja “bersih dari korupsi”.

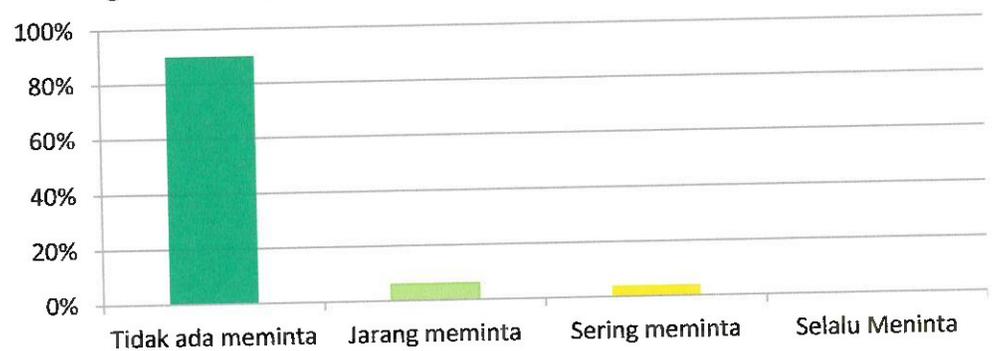
Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Penyalahgunaan Jabatan di sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 9. Indeks Pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Selalu meminta	1	0	0	0,00
2.	Sering meminta	2	2	4	0,08
3.	Jarang meminta	3	3	6	0,18
4.	Tidak ada meminta	4	45	90	3,60
Jumlah			50	100	3,86

*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai perunsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



Gambar 6.

Grafik Indeks Pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan

3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Lingkup Menjual Pengaruh ini diperoleh rata-rata skor 3,60 berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja “bersih dari korupsi”. Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Penyalahgunaan Jabatan dalam katagori berkinerja “bersih dari korupsi”.

Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Menjual Pengaruh di sajikan pada tabel berikut ini :

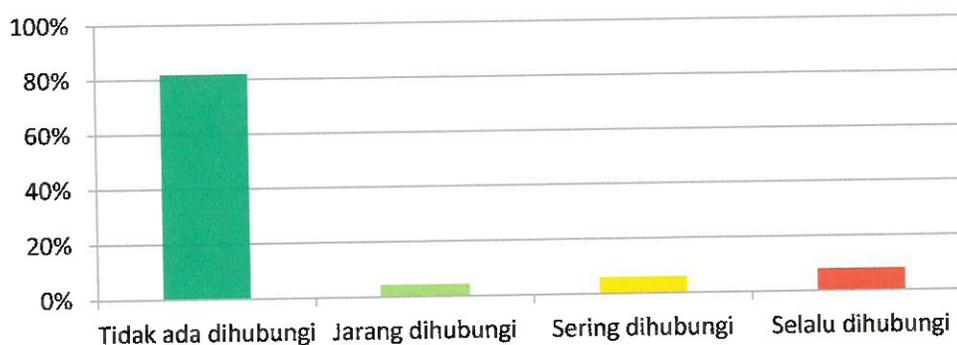
Tabel 10. Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Selalu dihubungi	1	4	8	0,08
2.	Sering dihubungi	2	3	6	0,12

3.	Jarang dihubungi	3	2	4	0,12
4.	Tidak ada dihubungi	4	41	82	3,28
Jumlah		50	100	3,60	

*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai perunsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



Gambar 7.
Grafik Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh

3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Lingkup Transaksi Biaya ini diperoleh rata-rata skor 3,72 berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja “ cukup bersih dari korupsi”. Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Transaksi Biaya dalam katagori berkinerja “bersih dari korupsi”.

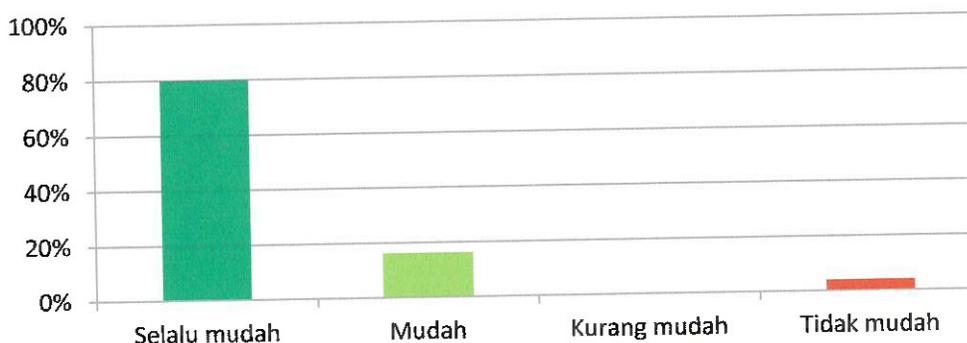
Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Transaksi Biaya di sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 11. Indeks Pada Indikator Transaksi Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Tidak mudah	1	2	4	0,04
2.	Kurang mudah	2	0	0	0,00
3.	Mudah	3	8	16	0,48
4.	Selalu mudah	4	40	80	3,20
Jumlah			50	100	3,72

*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai perunsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



Gambar 8.
Grafik Indeks Pada Indikator Transaksi Biaya

3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Penyalahgunaan Jabatan ini diperoleh rata-rata skor 3,77 berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja “bersih dari korupsi”. Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Biaya Tambahan dalam katagori berkinerja “bersih dari korupsi”.

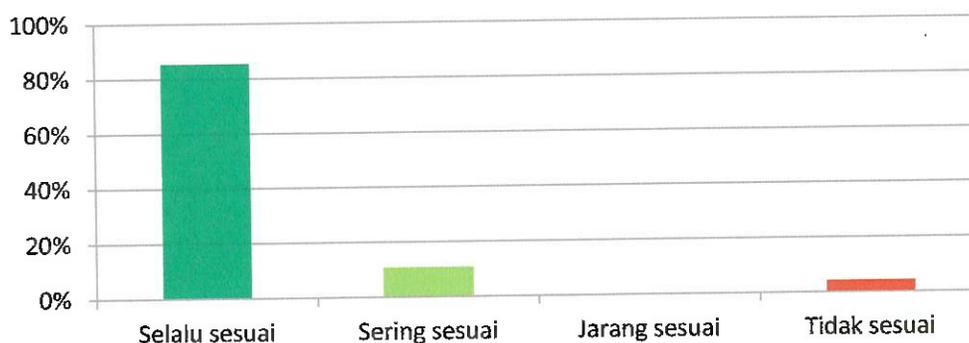
Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Biaya Tambahan di sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 12. Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Tidak sesuai	1	2	4,16	0,04
2.	Jarang sesuai	2	0	0	0,00
3.	Sering sesuai	3	5	10,42	0,31
4.	Selalu sesuai	4	41	85,42	3,42
Jumlah			48	100	3,77

*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai perunsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



Gambar 9.
Grafik Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan

3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Lingkup Hadiah ini diperoleh rata-rata skor 3,26 berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja “bersih dari korupsi”. Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Hadiah dalam katagori berkinerja “bersih dari korupsi”.

Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Hadiah di sajikan pada tabel berikut ini :

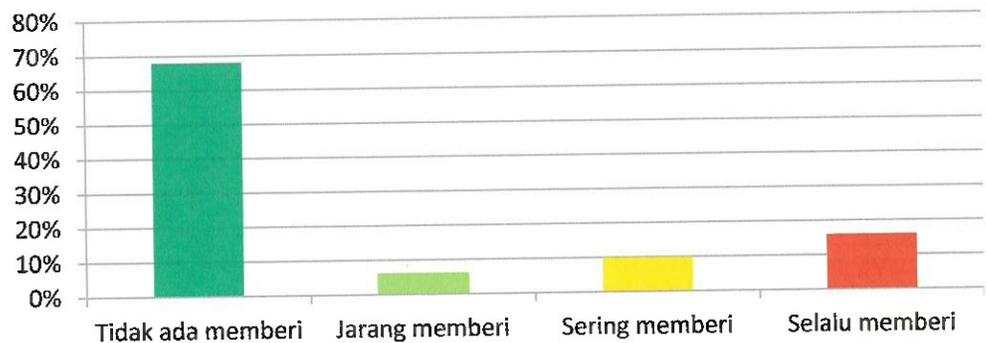
Tabel 13. Indeks Pada Indikator Hadiah

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Selalu memberi	1	8	16	0,16
2.	Sering memberi	2	5	10	0,20
3.	Jarang memberi	3	3	6	0,18

4.	Tidak ada memberi	4	34	68	2,72
Jumlah			50	100	3,26

*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai perunsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



Gambar 10.
Grafik Indeks Pada Indikator Hadiah

3.2.7. Indikator Transparansi Biaya.

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Lingkup Transparansi Biaya ini diperoleh rata-rata skor 3,82 berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja "bersih dari korupsi". Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Transparansi Biaya dalam katagori berkinerja "bersih dari korupsi".

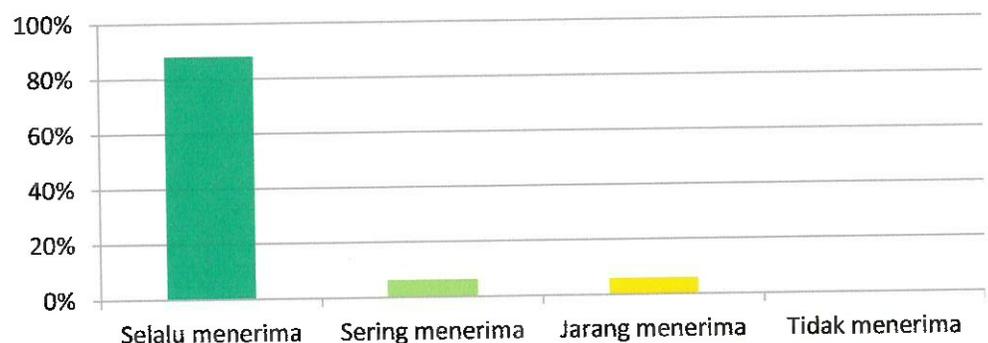
Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Transparansi Biaya di sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 14. Indeks Pada Indikator Transparansi Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Tidak menerima	1	0	0	0,00
2.	Jarang menerima	2	3	6	0,12
3.	Sering menerima	3	3	6	0,18
4.	Selalu menerima	4	44	88	3,52
Jumlah			50	100	3,82

*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai perunsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



Gambar 11.
Grafik Indeks Pada Indikator Transparansi Biaya

3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang

Lingkup Percaloan ini diperoleh rata-rata skor 3,90 berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja “bersih dari korupsi”. Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Percaloan dalam katagori berkinerja “bersih dari korupsi”.

Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Percaloan di sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 15. Indeks Pada Indikator Percaloan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Selalu Mengetahui	1	0	0	0,00
2.	Sering mengetahui	2	0	0	0,00
3.	Jarang mengetahui	3	5	10	0,30
4.	Tidak mengetahui	4	45	90	3,60
Jumlah			50	100	3,90

*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai perunsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



Gambar 12.
Grafik Indeks Pada Indikator Percaloan

3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Lingkup Perbuatan Curan ini diperoleh rata-rata skor 3,78 berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja “bersih dari korupsi”. Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Perbuatan Curang dalam katagori berkinerja “bersih dari korupsi”.

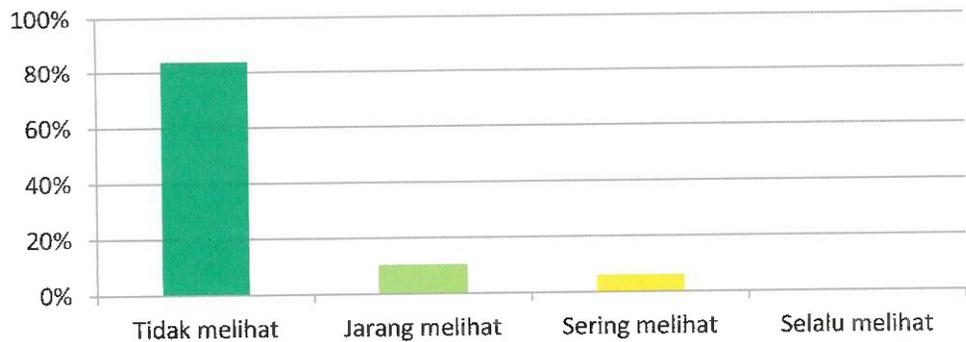
Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Perbuatan Curang di sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 16. Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Selalu melihat	1	0	0	0,00
2.	Sering melihat	2	3	6	0,12
3.	Jarang melihat	3	5	10	0,30
4.	Tidak melihat	4	42	84	3,36
Jumlah			50	100	3,78

*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai perunsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



Gambar 13.
Grafik Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang

3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia.

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Ruang Lingkup Transaksi Rahasia ini diperoleh rata-rata skor 3,92 berada pada interval 3,26 s/d 4,00, dengan kategori kinerja “bersih dari korupsi”. Dengan demikian kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Ruang Lingkup Transaksi Rahasia dalam katagori berkinerja “bersih dari korupsi”.

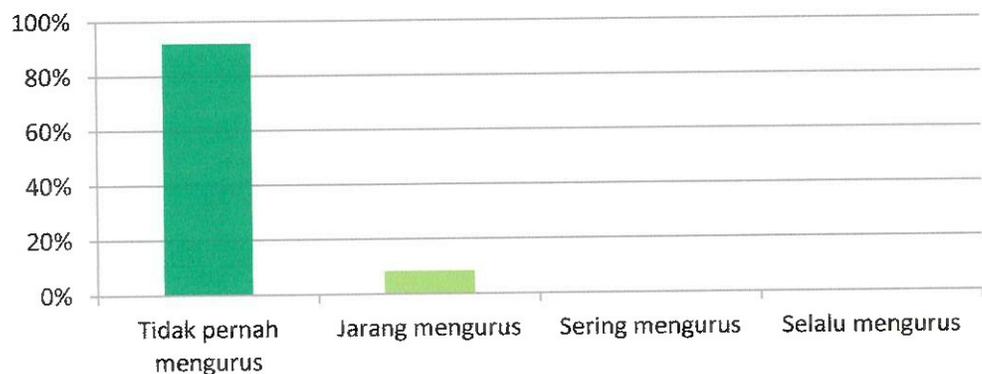
Hasil jawaban kuesioner Indeks Persepsi Korupsi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Ruang lingkup Transaksi Rahasia di sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 17. Indeks Pada Transaksi Rahasia

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	%	NRR
1.	Selalu mengurus	1	0	0	0,00
2.	Sering mengurus	2	0	0	0,00
3.	Jarang mengurus	3	4	8	0,24
4.	Tidak pernah mengurus	4	46	92	3,68
Jumlah			50	100	3,92

*NRR : Nilai Rata-Rata diperoleh dari jumlah nilai perunsur dibagi dengan jumlah responden.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



Gambar 14.
Grafik Indeks Pada Transaksi Rahasia

3.3. INDEKS PERSEPSI KORUPSI SATUAN KERJA PADA PENGADILAN

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sarolangun sebesar 3,75.

Tabel 18.
Indeks Persepsi Korupsi
Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun

No.	Ruang Lingkup	NRR	NRRT	IPK
1.	Manipulasi Peraturan	3,82	0,38	
2.	Penyalahgunaan Jabatan	3,86	0,39	
3.	Menjual Pengaruh	3,60	0,36	
4.	Transaksi Biaya	3,72	0,37	
5.	Biaya Tambahan	3,77	0,38	
6.	Hadiah	3,26	0,33	
7.	Transparansi Pembayaran	3,82	0,38	
8.	Percaloan	3,90	0,39	
9.	Perbuatan Curang	3,78	0,38	
10.	Transaksi Rahasia	3,92	0,39	
NILAI		3,75	0,375	93,75

Indeks **3,75** tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **93,50** ;

Tabel 19.
Persepsi Korupsi Satuan Kerja
pada Pengadilan Negeri Sarolangun

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00-1.75	25-43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76-2.50	43.76-62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51-3.25	62.51-81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26-4.00	81.26-100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. PERSEPSI RESPONDEN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN SATUAN KERJA PADA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN.

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 20.
Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun
1	Meningkatkan kualitas pelayanan
2	Transparan dan terbuka terhadap masyarakat
3	Peningkatan fasilitas Umum seperti Ruang Tunggu Pengunjung, Ruang Tunggu Jaksa, Ruang Tunggu Advokat, Toilet dan Lahan Parkir serta Free Wifi ;

4.1. KESIMPULAN.

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sarolangun diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Sarolangun memiliki Indeks Persepsi Korupsi **3,75** atau masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI** ;

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut :

No.	Ruang Lingkup	NRR	NRRT	IPK
1.	Manipulasi Peraturan	3,82	0,38	
2.	Penyalahgunaan Jabatan	3,86	0,39	
3.	Menjual Pengaruh	3,60	0,36	
4.	Transaksi Biaya	3,72	0,37	
5.	Biaya Tambahan	3,77	0,38	
6.	Hadiah	3,26	0,33	
7.	Transparansi Pembayaran	3,82	0,38	
8.	Percaloan	3,90	0,39	
9.	Perbuatan Curang	3,78	0,38	
10.	Transaksi Rahasia	3,92	0,39	
		NILAI	3,75	93,75

4.2. REKOMENDASI.

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sarolangun Semester I Tahun 2020 tersebut di atas, menunjukkan bahwa 3 (tiga) indikator yang memiliki nilai tertinggi yakni Transaksi Rahasia, Percaloan, dan Penyalahgunaan Jabatan memiliki indeks paling tinggi diantara indikator lainnya, namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa 3 (tiga) indikator yakni Hadiah, Menjual Pengaruh, dan Transaksi Biaya memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya yang perlu ditingkatkan agar dalam survei yang akan datang memiliki indeks yang tinggi.

INDEK PERSEPSI KORUPSI PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Priode Semester I Tahun 2020

Indeks Persepsi Korupsi	Profil responden
<h1>3,75</h1>	Jumlah : 50 Orang Jenis Kelamin • Laki-Laki : 40 Orang • Perempuan : 10 Orang Tingkat Pendidikan • SD : 3 Orang • SMP/SLTP : 5 Orang • SMA/SLTA : 17 Orang • DIPLOMA : - Orang • SARJANA : 21 Orang • PASCA SARJANA : 3 Orang
KATAGORI "BERSIH DARI KORUPSI"	

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI
AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS
PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN



PHILLIP MARK SOENTPIET, SH., MH.

NIP. 19741114 20012 1 002



PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KLAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang Kab.Sarolangun
☎ /FAX: (0745) 91006
Website : www.pn-sarolangun.go.id

Nomor Kuesioner :

--	--	--	--

(diisipetugas)

DAFTAR PERTANYAAN
SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KepadaYth.
Bapak/Ibu/Saudara Pengguna Layanan
PengadilanNegeriSarolangun

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa Bapak/Ibu/saudara terpilih sebagai responden penelitian kami. Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari Unit Pelayanan Instansi Pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di Instansi Pemerintah kepada masyarakat. Survey ini didasarkan pada Surat Dirjen Badilum tertanggal 13 April 2016 Nomor 520/DJU/PS.02/4/2016 serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah .

Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan instansi pemerintah dalam hal ini di Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun, untuk kepentingan tersebut kami menyampaikan kuesioner untuk diisi sesuai apa yang dirasakan dan dialami selama mendapatkan pelayanan kami. Tidak ada jawaban yang benar atau salah sehingga apapun jawaban yang dipilih tidak akan mempengaruhi pelayanan terhadap Bapak/Ibu/Saudara.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu/saudara untuk meluangkan waktu dalam mengisi kuesioner ini kami ucapkan terima kasih.

Sarolangun, Januari 2020

Tim Survey

**KUESIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI
TAHUN 2020**

IDENTITAS RESPONDEN :

1. Nama : (boleh diisi / tidak diisi) ;
2. Instansi/Perusahaan : ;
3. Umur : tahun
4. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
5. Pendidikan : Tidak Sekolah Diploma
 SD Sarjana (S1)
 SMP / SLTP Pasca Sarjana (S2/S3)
 SMA / SLTA
6. Pekerjaan Utama : PNS Petani/Nelayan
 TNI/POLRI Pedagang
 Pegawai Swasta Pelajar / Mahasiswa
 Wiraswasta

PETUNJUK :

1. Mohon diisi sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara(i) yang sebenarnya, karena hal ini tidak mempengaruhi kondite maupun pelayanan terhadap Bapak/ Ibu/saudara (i), dan betul-betul untuk kepentingan ilmiah.
2. Cara pengisian Kuesioner
 Bapak/Ibu/Saudara(i) memberi tanda silang (X) atau lingkaran pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i).

KUESIONER		
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i) ?		
	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan, tidak dipersulit untuk maksud tertentu ? ;	a. Tidak sesuai b. Jarang sesuai c. Sering sesuai d. Selalu sesuai
2.	Apakah dalam memperoleh layanan pengadilan secara cepat dan mudah selalu diberikan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ? ;	a. Selalu meminta b. Sering meminta c. Jarang meminta d. Tidak ada meminta

3.	Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara ? ;	<ul style="list-style-type: none"> a. Selalu dihubungi b. Sering dihubungi c. Jarang dihubungi d. Tidak pernah dihubungi
4.	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan ? ;	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak mudah b. Kurang mudah c. mudah d. Selalu mudah
5.	Apakah selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan ? ;	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak sesuai b. Jarang sesuai c. Sering sesuai d. Selalu sesuai
6.	Memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta) ? ;	<ul style="list-style-type: none"> a. Selalu memberikan b. Sering memberikan c. Jarang memberikan d. Tidak memberikan
7.	Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan ? ;	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak pernah menerima b. Jarang menerima c. Sering menerima d. Selalu menerima
8.	Pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan ? ;	<ul style="list-style-type: none"> a. ada mengetahui b. Sering mengetahui c. Jarang mengetahui d. Tidak ada mengetahui
9.	Pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di pengadilan ? ;	<ul style="list-style-type: none"> a. Selalu melihat b. Sering melihat c. Jarang melihat d. Tidak ada melihat
10.	Pernah mengurus perkara melalui Hakim/ Panitera/ Staff pengadilan diluar persidangan? ;	<ul style="list-style-type: none"> a. Selalu mengurus b. Sering mengurus c. Jarang mengurus d. Tidak pernah mengurus

Selanjutnya, mohon Bapak/Ibu/Saudara dapat memberikan SARAN-SARAN atau MASUKAN PERBAIKAN, supaya Pengadilan Negeri Sarolangun bisa meningkatkan kualitas pelayanan.

SARAN-SARAN / MASUKAN PERBAIKAN :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PELAKSANA :

1. Petugas :

- Nama :
- Tanda Tangan :
- Tanggal Pelaksana :

2. Pencacah/Penghitung hasil survei :

- Nama :
- Tanda Tangan :
- Tanggal Pelaksana :

3. Pengawas/Pemeriksa :

- Nama :
- Tanda Tangan :
- Tanggal Pelaksana :